BAB V
WACANA KRITIS SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN

A. Pemanfaatan Wacana Demokrasi dalam *Media Umat* Sebagai Bahan Ajar Berupa Modul

Wacana demokrasi yang dituangkan dalam tabloid *Media Umat* telah menjadi wacana yang khas, unik, dan menarik. Kekhasannya ini karena wacana demokrasi dalam tablod *Media Umat* ditampilkan tidak seperti oleh kebanyakan media yang cenderung berada pada posisi sejalan dengan arus utama (*mainstream*) yakni berada pada posisi pro, mendukung, menerima, bahkan mengkampanyekan dan membesarkan opini tentang demokrasi bahwa ia adalah sebuah sistem yang paripurna yang sudah final sebagai tatanan hidup untuk mengatur masyarakat.

Tabloid *Media Umat* justru mengambil peran melawan arus utama dalam hal pemberitaan terkait wacana demokrasi, ini tidak lepas dari ideologi Islam yang diusungnya, sehingga pemberitaan yang disajikan setidaknya mampu mengimbangi dominasi dari pemberitaan dengan wacana yang sama namun sejalan arus utama. Dominasi ini juga tampak pada bahan-bahan pembelajaran analisis wacana kritis di perguruan tinggi. Daya tarik yang coba ditampilkan tabloid *Media Umat* dalam pemberitaannya, menjadikan pentingnya wacana ini menjadi salah satu contoh yang dapat dimanfaatkan dalam mata kuliah anaisis wacana kritis di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, UPI Bandung .

B. Contoh Modul Analisis Wacana Kritis

Berikut ini adalah pemanfaatan materi analisis wacana kritis menggunakan model Roger Fowler dkk., yang disajikan berupa modul pembelajaran.

MODUL

MATA KULIAH
ANALISIS WACANA KRITIS
MODEL ROGER FOWLER, DKK

Agus Suryana, 2014
Demokrasi dalam perspektif tabloid Media Umat dan pemanfaatannya sebagai bahan ajar mata kuliah analisis wacana kritis di Perguruan Tinggi
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2014

PENGANTAR

Modul ini merupakan salah satu mata rantai yang tidak terpisahkan dari mata kuliah Analisis Wacana Kritis yang diajarkan di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Universitas Pendididkan Indonesia, Bandung. Dalam modul ini diuraikan tentang Analisis Wacana Kritis model Roger Fowler, dkk.

Analisis wacana adalah alternatif terhadap kebuntuan-kebuntuan dalam analisis media yang selama ini lebih didominasi oleh analisis isi konvensional dengan paradigma positivis atau konstruktivisnya. Jika yang kedua ini terpancang pada pertanyaan "apa", maka analisis wacana lebih jauh pada "bagaimana" dari sebuah pesan atau teks komunikasi. Lewat analisis wacana, kita akan tahu bukan hanya bagaimana isi teks berita, tetapi bagaimana dan mengapa pesan itu dihadirkan. Bahkan kita bisa lebih jauh membongkar penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan yang dijalankan dan diproduksi secara samar melalui teks-teks berita itu. Ulasan inilah yang akan diuraikan dalam modul ini.

Modul tentang analisis wacana model Roger Fowler, dkk ini akan mengantarkan mahasiswa pada pengertian tentang langkah-langkah analisis wacana yang dilakukan oleh Fowler, dkk secara sederhana. Pengertian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendapatkan pemahaman yang memadai tentang analisis wacana kritis.

Adapun sebagai korpus yang akan dijadikan contoh analisis model Roger Fowler, dkk ini adalah tabloid *Media Umat* edisi 119. 121, 122, dan 124 khusus pada topik-topik tentang implementasi demokrasi di Indonesia.

DAFTAR ISI

Modul Analisis Wacana Kritis; Model Roger Fowler dkk 1

Pengantar

Daftar Isi

Kompetensi Dasar

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Kegiatan Belajar

Latihan

Petunjuk Latihan

Rangkuman

Tes Formatif

Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Kunci Jawaban

Daftar Pustaka

KOMPETENSI DASAR

Mengetahui analisis wacana kritis model Roger Fowler dkk., dan langkah-langkah implementasinya dalam konteks media.

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

- ☞ Mahasiswa dapat menjelaskan alur analisis wacana kritis model Roger Fowler, dkk.
- ☞ Mahasiswa dapat mengimplementasikan analisis wacana kritis model Roger Fowler, dkk dalam sebuah teks berita.
- ☞ Mahasiswa dapat menarik kesimpulan dari hasil kajian analisis wacana kritis model Roger Fowler, dkk.

KEGIATAN BELAJAR

Analisis Wacana Kritis Model Roger Fowler dkk.

1. Uraian dan Contoh

Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress, dan Tony Trew adalah sekelompok pengajar di Universitas East Anglia. Kehadiran mereka terutama ditandai dengan diterbitkannya buku *Language and Control* pada tahun 1979. Pendekatan yang mereka lakukan kemudian dikenal sebagai *critical linguistics. Critical linguistics* terutama memandang bahasa sebagai praktik sosial, melalui

mana suatu kelompok memantapkan dan menyebarkan ideologinya. *Critical linguistics* terutama dikembangkan dari teori linguistik. Yang dilakukan oleh sekelompok peneliti ini adalah melihat bagaimana tata bahasa /*grammar* tertentu dan pilihan kosakata tertentu membawa implikasi dan ideologi tertentu.

Dalam membangun model analisisnya, Roger Fowler, dkk., terutama mendasarkan pada penjelasan Halliday mengenai struktur dan fungsi bahasa. Fungsi dan struktur bahasa ini menjadi dasar struktur tata bahasa, dimana tata

yang dilakukan oleh Fowler, dkk., adalah meletakkan tata bahasa dan praktik pemakaiannya tersebut untuk mengetahui praktik ideologi. Berikut ini akan diuraikan satu persatu beberapa elemen yang dipelajari oleh Fowler dkk., tersebut.

A. Kosakata

Roger Fowler dkk. memandang bahasa sebagai sistem klasifikasi. Bahasa mendeskripsikan bagaimana realitas dunia dilihat, memberi kemungkinan seseorang untuk mengontrol dan mengatur pengalaman realitas sosial. Klasifikasi ini berbeda-beda antara orang atau kelompok satu dengan lainnya, sebab mengacu pada pengalaman budaya, sosial, dan politik yang berbeda pula. Pengalaman dan politik yang berbeda dapat dilihat dalam bahasa yang dipakai yang menggambarkan bagaimana pertarungan sosial terjadi.

Di sini, peristiwa yang sama dibahasakan dengan bahasa yang berbeda. Kata-kata yang berbeda itu semata-mata tidak saja masalah sintaksis tapi praktik ideologi tertentu. Pembaca juga akan menerima dengan pandangan yang berbeda pula terhadap penggunaan bahasa yang berbeda-beda. Kosakata menurut Eriyanto yaitu;

(a) mampu mengklasifikasi realitas tertentu dalam kategorisasi dan akhirnya dibedakan dengan realitas yang lain. Klasifikasi ini terjadi karena kompleksitas realitas, sehingga orang, menyusun dalam tingkat yang lebih sederhana dari realitas itu. Klasifikasi menyediakan untuk mengontrol informasi dan pengalaman.

(b) mampu memberi batasan pandangan. Seperti dikatakan Roger Fowler, bahasa pada dasarnya bersifat membatasi, kita diajak berpikir untuk memahami seperti itu, bukan yang lain. Dikarenakan pembaca atau khalayak tidak mengalami atau mengikuti suatu peristiwa secara langsung maka ketika membaca kosakata tertentu akan dihubungkan dengan realitas

(c) menjadi ranah dalam pertarungan wacana. Setiap pihak mempunyai versi tersendiri atas suatu masalah. Klaim atas kebenaran, dasar pembenar dan penjelas mengenai suatu masalah, berusaha agar versi kelompoknya dianggap paling benar dan lebih menentukan dalam mempengaruhi opini publik.

(d) menjadi alat marjinalisasi. Kata, tulis Roger Fowler dkk., adalah pilihan linguistik tertentu – kata, kalimat, proposisi – membawa nilai ideologis tertentu. Kata dipandang bukan suatu yang netral, tapi ada implikasi ideologis tertentu. Pemakaian kata, kalimat, proposisi, bentuk kalimat, gaya, tidak semata-mata persoalan teknis tata bahasa atau linguistik, tapi ekspresi suatu ideologi: upaya pembentukan opini publik, meneguhkan, dan membenarkan pihak sendiri dan mengucilkan pihak lain. Teks memproduksi "posisi pembacaan" untuk khalayak, menyediakan perspektif bagaimana suatu teks harus dilibatkan juga hubungan transaksional dengan pembaca.

Titik perhatian dari Roger Fowler dkk. adalah pada representasi, bagaimana kelompok, seseorang, kegiatan, atau peristiwa tertentu ditampilkan dalam wacana publik. Proses representasi ini selalu melalui

medium (bahasa). Bukan bias atau distorsi dari pemakaian bahasa yang menjadi fokus utama, tapi bagaimana pemakaian bahasa tertentu tidak objektif dan membawa nilai ideologis tertentu. Karena itu model Fowler dkk., dipusatkan pada salah representasi (*misrepresentation*) dan diskriminasi seseorang/kelompok dalam wacana publik.

Di sini, bagaimana pemakaian bahasa tertentu dapat secara sengaja atau tidak memarjinalkan dan mendiskriminasikan seseorang/kelompok dari pembicaraan publik.

B. Tata Bahasa

Penggunaan tata bahasa dalam mewacanakan suatu kasus atau

pembaca. Roger fowler dkk., memandang bahasa sebagai suatu set katagori dan proses yang menggambarkan antara objek dengan peristiwa. Dalam hal ini, dapat dilihat dari penggunaan bentuk kalimat. Seperti, penggunaan kalimat transitif (kalimat langsung), yakni melihat aktor atau bagianmana yang dianggap penyebab dan aktor atau bagian mana yang dianggap sebagai akibat.

Juga pada kalimat intransitif (kalimat tidak langsung), yakni aktor dihubungkan dengan proses tanpa menyebutkan atau menjelaskan akibat atau aktor lain yang dikenakan tindakan. Umumnya dua kalimat di atas biasanya digunakan pada bentuk kalimat aktif dan bentuk kalimat pasif. Penggunaan tata bahasa dalam menganalisis wacana pemberitaan dapat dilakukan dengan dua langkah:

a. Efek bentuk kalimat pasif : menghilangkan pelaku

Dalam kalimat aktif, yang ditekankan adalah subjek pelaku dari suatu tindakan, sedangkan kalimat pasif yang ditekankan adalah sasarannya atau korbannya. Efek dari kalimat pasif ini tidak hanya membuat halus atau netral

posisi pelaku tatapi pelaku juga dapat dihilangkan dalam struktur kalimat. Titik tekan kalimatnya adalah sasaran atau korban. Seperti: "seorang mahasiswa tertembak peluru saat berdemonstrasi di depan gedung MPR". Posisi pelaku dihilangkan dengan memakai kosakata "tertembak".

b. Efek nominalisasi: menghilangkan pelaku

Efek dari nominalisasi adalah dengan melihat kalimat verbal menjadi kalimat nominal. Dalam hal ini, wacana yang dihadirkan dengan menghilangkan subjek atau pelaku karena dalam bentuk kalimat nominal titik tekannya bukan pada tindakan tetapi pada peristiwanya.

c. Kontek sejarah

buku-buku sejarah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dengan memilih yang sesuai dengan kontek sejarah yang terjadi.

Berikut ini akan disajikan contoh analisis wacana kritis model Roger Fowler dkk., dengan korpus tabloid *Media Umat* edisi 119.

Terjebak Ritual Demokrasi Siapa Pilihan Umat?

Rubrik 'Media Utama'

MU Edisi 119, 3-16 Januari, Halaman 4

Tinggal empat bulan lagi, pesta demokrasi akan dihelat kembali. Partai-partai politik sudah mengelus-elus kandidatnya untuk memperebutkan kursi tertinggi negeri ini. Spanduk dan poster berserakan di jalanan. Para kandidat muncul di layar kaca dengan tampang yang tak alami lagi.

Seperti perhelatan sebelumnya, mereka lagi-lagi berbusa-busa mengobral janji. Semua ingin menjadikan negeri ini lebih baik dari sebelumnya kendati tidak dibarengi program yang rinci dan terukur. Dan dapat dipastikan tidak ada satu kandidat pun yang membawa misi perubahan radikal.

Melihat pemunculan mereka di media massa atau di area publik, dapat dipastikan mereka mengeluarkan dana yang luar biasa besar. Sebagian dari mereka memang para pengusaha. Bahkan ada yang memiliki jaringan media massa. Sebagian lain adalah orang-orang yang *dibackingi* orang kaya.

Kebanyakan mereka adalah stok lama. Mereka adalah orang-orang yang pernah memimpin negeri ini atau berkecimpung bersama rezim-rezim lama yang selama ini dinilai gagal. Dan sepak terjangnya tidak menunjukkan adanya keberanian mereka mengubah kondisi yang rusak bersama rezim tersebut.

Memang ada pula stok baru. Tapi sebenarnya dia selama ini belum teruji kemampuannya. Dia memang populer di media massa. Bukan karena

Nah, sosok-sosok inilah yang akan disodorkan kepada rakyat di negeri ini yang mayoritas Muslim. Mereka ingin memperjuangkan Islam? Jangan tanya soal itu. Tak pernah satu pun kandidat baik stok lama maupun stok baru yang akan mendarmabaktikan jabatannya untuk Islam. Semua mewakili kalangan sekuler-liberal yang pro Barat dan sebagian anti-islam.

Bahkan rekam jejak mereka menunjukkan betapa mereka sangat dekat dengan kalangan non Muslim. Hadir Natal Bersama misalnya, sudah biasa. Bahkan ada kandidat yang bertekad memberantas kalangan Islam yang dianggap radikal.

Apatis

Munculnya sosok-sosok tersebut tanpa membawa misi perubahan - kecuali perubahan kepemimpinan saja – menjadi salah satu alasan banyak masyarakat yang apatis terhadap pemilu. Selain itu masyarakat telah muak dengan janji-janji kosong yang tak pernah terwujud.

Banyak pihak memprediksi partisipasi masyarakat akan terus menurun. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dari waktu ke waktu, masyarakat mulai enggan menggunakan hak pilihnya. Tren ini kian kentara di masyarakat perkotaan yang mulai melek politik. Mereka mulai sadar bahwa pemilu tak mengubah kondisi secara signifikan meski wakil rakyat dan pimpinan berganti-ganti.

Rakyat telah merasakan keberadaan wakil rakyat dan penguasa tak mengubah apa-apa. Malah mereka sadar bahwa justru wakil rakyat bersama penguasalah yang membuat kondisi negeri ini makin runyam.

Wakil rakyat tak pernah sejalan dengan aspirasi rakyat kendati ada partai yang menyatakan suara rakyat adalah suara partainya. Dalam beberapa kebijakan, justru rakyat dikorbankan dan penguasa dimenangkan.

Di kalangan Muslim, suara mereka diharapkan tapi begitu wakil rakyat duduk di lembaga perwakilan, aspirasi Islam diabaikan. Ada beberapa UU yang justru menjerumuskan umat Islam ke dalam kerusakan.

Anehnya, sikap masyarakat yang apatis ini disalahkan oleh partai politik. Padahal sikap rakyat ini adalah dampak dari perilaku partai politik itu sendiri yang abai terhadap rakyat. Kaum Muslim pun kembali digiring untuk memilih pemimpin/wakil rakyat yang tak pernah merepresentasikan Islam. Ayat-ayat suci pun digunakan untuk melegitimasi penggiringan itu.

Perubahan

Perubahan menjadi hal yang dituju. Tapi perubahan seperti apa? Inilah

semuanya berbuat abstrak.

Jika perubahan itu hanya perubahan sosok kepemimipinan, ini adalah mengulang kesalahan yang ke sekian kalinya. Bukankah negeri ini sudah berulang kali berganti pimpinan dan wakil rakyat? Bukankah semuanya gagal?

Nah, kalau mau jeli, sebenarnya persoalannya bukan terletak pada sosok pemimpinnya saja. Faktor sistem, sebenarnya sangat menentukan. Sebaik apapun pemimpinnya, kalau sistemnya bobrok maka dia tidak akan mampu membawa laju negeri yang dipimpinnya. Dalam kasus negeri ini, terbukti sistem kapitalis-demokrasi saat ini telah gagal.

Maka, perubahan sistem menjadi mutlak dilakukan jika ingin ada perubahan yang hakiki. Pertanyaannya, sistem apa? Tidak ada alternatif sistem lain kecual sistem Islam. Kembali ke sosialis-komunis berarti mengulang kesalahan. Mempertahankan sistem kapitalis-sekuler-demokrasi berarti berkutat dalam kubangan kegagalan.

Sistem Islam memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh sistem lainnya. Sistem ini berasal dari Yang Maha Baik, Yang Maha Benar, Yang Maha Adil. Sistem ini terbukti berhasil membangun peradaban yang tinggi yang belum pernah ada sebelumnya selama berabad-abad lamanya.

Nah, dalam konteks perubahan menuju penerapan Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah itulah seharusnya partai berada. Bukan sebaliknya, partai politik menjadi benteng bagi sistem yang rusak. Karena itu, tidak ada

pahalanya – mungkin malah berdosa – memimpin negeri milik Allah dengan sistem rusak buatan manusia.

Lama kelamaan umat menyadari apa yang terjadi. Berbagai ketidakadilan dan penindasan yang mereka alami telah menjadikan mereka rindu terhadap penerapan syariah Islam secara kaffah. Survei global membuktikan itu.

Jadi, jangan kaget ketika Khilafah tegak dan menerapkan syariah secara kaffah, masyarakat dunia khususnya dunia Islam akan menyambutnya dengan suka cita. Inilah masa yang dijanjikan Allah dan dinantikan oleh umat.

Dari wacana di atas dapat diuraikan analisis wacana kritis model Roger

1. Topik-Topik Pemberitaan Demokrasi Pada Tabloid *Media Umat*

Pemberitaan tentang bobroknya pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam tabloid *Media Umat* secara konsisten disajikan integral dengan topik-topik yang menjadi *headline* sehingga pembaca akan mendapati uraian analisis dan pembahasan tentang suatu topik yang pada akhirnya dibawa pada kesimpulan bahwa kondisi yang disampaikan tersebut adalah akibat dari kebobrokkan demokrasi.

Topik-topik pemberitaan demokrasi pada tabloid *Media Umat* disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Topik Pemberitaan Demokrasi pada Tabloid *Media Umat* edisi 119

No	Topik Pemberitaan	Edisi

1	Terjebak Ritual Demokrasi Siapa Pilihan Umat?	19 (3-16 Januari 2014)
2	2014: Pentingnya Kristalisasi Kesadaran Umat	19 (3-16 Januari 2014)
3	Rekam Jejak Para Kandidat	19 (3-16 Januari 2014)
4	Partai Bermasalah, Bikin Rakyat Susah	19 (3-16 Januari 2014)
5	Agar Perubahan Tak Kandas Lagi	19 (3-16 Januari 2014)
6	Partai Islam Tinggal Nama	19 (3-16 Januari 2014)
7	Umat Butuh Khilafah	19 (3-16 Januari 2014)
8	Berdasarkan UU, Golput Boleh	19 (3-16 Januari 2014)
9	Sadarlah, Sekarang Saatnya Ganti Sistem!	19 (3-16 Januari 2014)

Wacana yang dominan dari setiap pemberitaan dengan topik demokrasi di tabloid *Media Umat* adalah gambaran demokrasi yang identik

Sejumlah rentetan peristiwa yang hadir penuh dengan kontradiktif dijadikan argumentasi utama *Media Umat* dalam melakukan "serangannya" terhadap demokrasi. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang tidak amanah, tidak jujur, tidak adil, penuh dengan praktik politik transaksional yang kental dengan korupsi, kolusi, manipulasi, hingga intimidasi dengan berbagai cara terbukti telah mencetak politikus yang jauh dari harapan masyarakat.

2. Kosakata yang Digunakan Tabloid *Media Umat*

Demokrasi yang digambarkan tabloid *Media Umat* menjelma menjadi sosok biang kerok atas permasalahan yang terjadi di negeri ini. Hal tersebut tercermin dari kosakata yang dipilih tabloid *Media Umat* dalam menyajikan setiap analisis pemberitaannya yang cenderung negatif terhadap pelaksanaan

sistem demokrasi. Secara umum kosakata yang terangkum dalam pemberitaan di tabloid *Media Umat* edisi 119 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Kosakata yang Digunakan Tabloid *Media Umat*

Edisi	Kosakata yang digunakan
119 (3-16 Januari 2014)	kesadaran, kemiskinan, kebodohan, perampokkan, kemaksiatan, korupsi, kriminalitas, persoalan, multikompleks, solusi, syariah, khilafah, perubahan, kaki tangan, wajib, ditolak, tersesat, sistem, kufur, dakwah, politik, tipu daya, *ahlul quwwah*, kekuasaan, ritual, demokrasi, pesta, janji, radikal, sekular, liberal, pro Barat, anti-Islam, legitimasi, penggiringan, bobrok, rezim, sistem.

Kosakata-kosakata yang terangkum dalam tabloid *Media Umat* empat edisi tersebut adalah kosakata secara umum dan akan disortir mana kosakata

3. Kalimat yang Digunakan Tabloid *Media Umat*

Selain kosakata, tingkat yang ingin dilihat dalam analisis ini adalah tingkat dalam tataran kalimat. Beberapa wacana dalam tabloid *Media Umat* mengandung wacana kritis tingkat kalimat yang di dalamnya diungkap pembahasan dan ulasan mengenai implementasi sistem demokrasi yang dengan eksplisit telah menyimpang dan penuh pertentangan dengan adagium yang selama ini didengung-dengungkan yakni demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, atau demokrasi menjadikan suara rakyat suara kebenaran, demokrasi mengakomodasi semua kalangan, dll.

Penggambaran secara umum tentang tingkat kalimat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Kalimat yang Digunakan Tabloid *Media Umat*

Edisi	Kalimat yang digunakan
119 (3-16 Januari 2014)	- Mereka mulai sadar bahwa pemilu tak mengubah kondisi secara signifikan meski wakil rakyat dan pimpinan berganti-ganti. - Rakyat telah merasakan keberadaan wakil rakyat dan penguasa tak mengubah apa-apa. - Malah mereka sadar bahwa justru wakil rakyat bersama penguasalah yang membuat kondisi negeri ini makin runyam. - Wakil rakyat tak pernah sejalan dengan aspirasi rakyat kendati ada partai yang menyatakan suara rakyat adalah suara partainya. - Dalam beberapa kebijakan, justru rakyat dikorbankan dan penguasa dimenangkan. - Di kalangan Muslim, suara mereka diharapkan tapi begitu wakil rakyat duduk di lembaga perwakilan, aspirasi Islam diabaikan.
	umat Islam ke dalam kerusakan. - Anehnya, sikap masyarakat yang apatis ini disalahkan oleh partai politik. - Padahal sikap rakyat ini adalah dampak dari perilaku partai politik itu sendiri yang abai terhadap rakyat.

Agus Suryana, 2014
Demokrasi dalam perspektif tabloid Media Umat dan pemanfaatannya sebagai bahan ajar mata kuliah analisis wacana kritis di Perguruan Tinggi
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	- Kaum Muslim pun kembali digiring untuk memilih pemimpin/wakil rakyat yang tak pernah merepresentasikan Islam. - Ayat-ayat suci pun digunakan untuk melegitimasi penggiringan itu. - Sebaik apapun pemimpinnya, kalau sistemnya bobrok maka dia tidak akan mampu membawa laju negeri yang dipimpinnya. - Dalam kasus negeri ini, terbukti sistem kapitalis-demokrasi saat ini telah gagal. - Kembali ke sosialis-komunis berarti mengulang kesalahan. - Mempertahankan sistem kapitalis-sekuler-demokrasi berarti berkutat dalam kubangan kegagalan. - Bukan sebaliknya, partai politik menjadi benteng bagi sistem yang rusak.
	berdosa – memimpin negeri milik Allah dengan sistem rusak buatan manusia.

Kalimat-kalimat dalam tabel tersebut secara eksplisit maupun implisit mengandung wacana kritis yang merepresentasikan ideologi yang dianut tabloid *Media Umat*. Uraian tentang penggunaan tata bahasa dalam hal ini kalimat akan dijelaskan dalam pembahasan analisis data.

4. Kosakata

a. Kosakata: Membuat Klasifikasi

Bahasa pada dasarnya selalu menyediakan klasifikasi. Klasifikasi terjadi karena realitas begitu kompleksnya, sehingga orang kemudian membuat penyerderhanaan dan abstraksi dari realitas tersebut. Realitas tersebut bukan hanya bisa dikenali, pada akhirnya juga berusaha dibedakan dengan yang lain. Untuk itu, klasifikasi menyediakan arena untuk mengontrol informasi dan pengalaman. Untuk melihat bagaimana klasifikasi dalam wacana tabloid *Media Umat* edisi 119, berikut uraiannya.

Dalam tabloid *Media Umat* edisi 119 (3-16 Januari 2014), halaman 4 pada rubrik Media Utama dengan judul "Terjebak Ritual Demokrasi Siapa Pilihan Umat?". disebutkan kosakata "melegitimasi" untuk menggambarkan bahwa dalam sistem demokrasi akan tumbuh subur perilaku para calon wakil rakyat (calon legislatif) ataupun calon presiden yang maju pada ajang pemilu presiden 2014 yang memaksakan segala cara demi meraih dukungan masyarakat, sebagai contoh mereka mencoba menggiring masyarakat untuk memilihnya dan menjadikan ayat-ayat suci untuk penggiringan tersebut.

Kita lihat di sini bagaimana kata-kata tersebut menyediakan klasifikasi bagaimana realitas dipahami. Klasifikasi ini bermakna peristiwa seharusnya dilihat dari sisi yang satu bukan yang lain

yang dilakukan para caleg dan capres dalam upaya mereka mencari simpati dari rakyat agar memilihnya dalam pemilu. Tabloid *Media Umat* telah membentuk klasifikasi dengan realitas tertentu.

Kosakata ini memberi arahan kepada khalayak bagaimana realitas seharusnya dipahami. Perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 4. Membuat Klasifikasi

Klasifikasi (Wakil Rakyat)	Klasifikasi (Wakil Kapitalis)
membela rakyat	membela pemilik modal

membawa perubahan	sekadar ganti pemimpin, tak mengubah apa-apa
menepati janji	janji-janji kosong
Berharap	Apatis

b. Kosakata: Membatasi Pandangan

Untuk melihat bagaimana kosakata mempengaruhi pandangan kita, berikut akan diuraikan pembahasannya.

Pada tabloid *Media Umat* edisi 119 kosakata yang digunakan menunjukkan adanya pembatasan pandangan yang dilakukan. Pemakaian kata "melegitimasi" membatasi pikiran kita dengan persepsi khalayak, bahwa kampanye para caleg dan capres telah mengarah pada upaya "memaksakan" segala cara guna meraih dukungan masyarakat sebagai konstituennya. Menurut KBBI legitimasi berarti keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud; kesahan; pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau

Dengan pemakaian kata itu, realitas sepak terjang para caleg atau capres (dengan sengaja) "dibongkar" dan diungkap ke pubik bahwa materi kampanye mereka hanya berisi janji-janji kosong dan ada upaya pembenaran dengan mengutip ayat-ayat suci agar janji-janji kosong itu terlihat benar adanya. Hal tersebut tersaji dalam tabel 2.

Tabel 5. Pembatasan Pandangan Pemberitaan

Kategori	Wakil Rakyat	Wakil Kapitalis
Visi-misi	• membela rakyat • membawa perubahan	• membela pemilik modal • sekadar ganti pemimpin, tak mengubah apa-apa

Realisasi	• menepati janji • berharap	• janji-janji kosong • apatis

c. Kosakata: Pertarungan Wacana

Penggunaan kosakata juga pada gilirannya menggambarkan pertarungan wacana antarpihak yang berkepentingan dalam wacana demokrasi tersebut. Dalam penelitian ini pertarungan wacana tergambar dalam wacana pemberitaan *Media Umat*. Pertarungan wacana menggambarkan bagaimana pihak media mengambil peran dan diperankan dalam pemberitaan. Semakin dominan perannya semakin besar kemungkinan memenangkan pertarungan wacana. Sebaliknya semakin kecil peran pemberitaannya, maka pihak media menempatkan posisi dalam kedudukan yang terpojokkan. Dalam *Media Umat* edisi 119 tampak bagaimana pertarungan wacana tersaji sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.

Tabel 6. Pertarungan Wacana Demokrasi

• Pesta demokrasi akan dihelat kembali • Semua ingin menjadikan negeri ini lebih baik dari sebelumnya • Perubahan menjadi hal yang dituju	• Sebaik apapun pemimpinnya, kalau sistemnya bobrok maka dia tidak akan mampu membawa laju negeri yang dipimpinnya. • Rakyat telah merasakan keberadaan wakil rakyat dan penguasa tak mengubah apa-apa. • Mempertahankan sistem kapitalis-sekuler-demokrasi berarti berkutat dalam kubangan

	kegagalan.

d. Kosakata: Marjinalisasi

Pada akhirnya, kosakata akan menggambarkan marjinalisasi aktor atau pelaku dalam wacana tersebut. *Media Umat* lebih banyak menyebutkan kosakata marjinalisasi dalam bentuk peristiwa. Beberapa kosakata yang digunakan antara lain, *kemiskinan, kebodohan, perampokkan, kemaksiatan, korupsi, kriminalitas, kaki tangan, tersesat, kufur, tipu daya, radikal, sekular, liberal, pro Barat, anti-Islam, melegitimasi, penggiringan,* dan *bobrok.*

Tabel 7. Marjinalisasi Aktor

Aktor (Korban)	Peristiwa	Aktor (Pelaku)
Masyarakat	diobral janji	Para kandidat (caleg dan capres)
Kursi kekuasaan	Diperebutkan	Partai politik
Kalangan Islam radikal	Memberantas	Kandidat
Rakyat	kondisi makin runyam	Wakil rakyat

Rakyat	aspirasi Islam diabaikan	Wakil rakyat
Umat	Menjerumuskan	Undang-undang
Ayat-ayat suci	Melegitimasi	Para kandidat
Rakyat	Ketidakadilan, penindasan	Penguasa

5. Penggunaan Kalimat dalam Pemberitaan Demokrasi pada Tabloid *Media Umat*

Pada bagian ini dideskripsikan bagaimana peristiwa digambarkan dalam kalimat (rangkaian kata). Kalimat yang digunakan dapat berbentuk

aksional-relasional, transitif-intransitif, aktif-pasif, dan verba-nomina. Masing-masing kalimat tersebut menggambarkan dan memfokuskan penekanan yang berbeda-beda. Melalui bentuk kalimat tersebut implementasi demokrasi yang penuh dengan paradoks dapat digambarkan lebih jelas. Berikut disajikan contoh kalimat yang terdapat dalam *Media Umat* edisi 119 .

Tabel 8. Klasifikasi Kalimat dalam Pemberitaan Wacana Demokrasi edisi 119

Kategori	Deskripsi Kalimat
Aksional	• Mereka mulai sadar bahwa pemilu tak mengubah kondisi secara signifikan meski wakil rakyat dan pimpinan berganti-ganti. • Bukan sebaliknya, partai politik menjadi benteng bagi sistem yang rusak. • Sebaik apapun pemimpinnya, kalau sistemnya bobrok maka dia tidak akan mampu membawa laju negeri yang dipimpinnya.
Relasional	• Wakil rakyat tak pernah sejalan dengan aspirasi rakyat kendati ada partai yang menyatakan suara rakyat adalah suara partainya.
	politik itu sendiri yang abai terhadap rakyat.
Aktif	• Ada beberapa UU yang justru menjerumuskan umat Islam ke dalam kerusakan. • Rakyat telah merasakan keberadaan wakil rakyat dan penguasa tak mengubah apa-apa. • Mempertahankan sistem kapitalis-sekuler-demokrasi berarti berkutat dalam kubangan kegagalan.
Pasif	• Ayat-ayat suci pun digunakan untuk melegitimasi

Agus Suryana, 2014
Demokrasi dalam perspektif tabloid Media Umat dan pemanfaatannya sebagai bahan ajar mata kuliah analisis wacana kritis di Perguruan Tinggi
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	penggiringan itu. • Anehnya, sikap masyarakat yang apatis ini disalahkan oleh partai politik. • Di kalangan Muslim, suara mereka diharapkan tapi begitu wakil rakyat duduk di lembaga perwakilan, aspirasi Islam diabaikan. • Kaum Muslim pun kembali digiring untuk memilih pemimpin/wakil rakyat yang tak pernah merepresentasikan Islam. • Dalam beberapa kebijakan, justru rakyat dikorbankan dan penguasa dimenangkan.
Verba	• Malah mereka sadar bahwa justru wakil rakyat bersama penguasalah yang membuat kondisi negeri ini makin runyam. • Karena itu, tidak ada pahalanya –mungkin malah berdosa– memimpin negeri milik Allah dengan sistem rusak buatan manusia.
	• Kembali ke sosialis-komunis berarti mengulang kesalahan. saat ini telah gagal.

Penggunaan kalimat pada *Media Umat* tergambar pada teras berita, yaitu *Terjebak Ritual Demokrasi; Siapa Pilihan Umat*. Kalimat tersebut menggambarkan bagaimana *Media Umat* menempatkan demokrasi sebagai ritual yang bisa menjebak masyarakat untuk masuk dalam perangkap kehidupan yang lebih sengsara tanpa adanya perubahan yang signifikan.

Retorika yang digunakan *Media Umat* jelas-jelas menggambarkan sikap tidak sejalan dan menolak ide demokrasi beserta pelaksanaannya di negeri ini

yang digambarkan melalui tajuk *"Mempertahankan sistem kapitalis-sekuler-demokrasi berarti berkutat dalam kubangan kegagalan."*

LATIHAN

Dari contoh yang sudah dipaparkan di atas, kerjakanlah latihan berikut ini:

a) Buatlah kerangka analisis Roger Fowler dkk., untuk membedah kata-kata dan kalimat-kalimat yang terdapat pada wacana dalam tabloid *Media Umat* edisi 122 dan 124 berikut ini.

b) Kerjakan hal-hal berikut:

- Tentukan terlebih dahulu topik, kosakata, dan kalimat yang ada dalam *Media Umat* edisi 122 dan 124 tersebut!
- Analisislah penggunaan kata yang terdapat dalam wacana tersebut!
- Analisislah penggunaan kalimat yang terdapat dalam wacana tersebut!

Wacana 1

Dadlat Wakil Rakyat

Rubrik 'Media Utama'
MU Edisi 122, 21 Februari-6 Maret 2014, Halaman 7

Demokrasi memang mahal. Maka hanya mereka yang memiliki modal besarlah yang akan menikmati demokrasi itu. Ini berlaku pula pada para calon anggota legislatif. Yang modal cekak atau pas-pasan pasti tersingkir.

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan, sistem politik saat ini mengubah sistem demokrasi menjadi demokrasi kapitalis. Efeknya berimbas pada pengambilan kebijakan yang sangat transaksional.

Tak heran jika rakyat tak merasakan dampak signifikan dari wakil rakyat mereka yang duduk di DPR. Hasil Survei Nasional Pol-Tracking Institute akhir tahun lalu menyebut sebagian besar masyarakat tidak puas dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. Hanya 12 persen saja yang mengatakan kinerja DPR baik.

Menurut Direktur Riset Arya Budi, survei ini menunjukkan hanya 12,64 persen masyarakat yang menjawab puas terhadap kinerja DPR periode 2009-2014. Sisanya ada 61,68 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja DPR. Sebanyak 25,68 persen menyatakan tidak tahu. Hal ini bisa dijelaskan dengan menelusuri riwayat tiga fungsi dewan: legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Menurut Arya, rendahnya penilaian publik terhadap kinerja DPR RI periode ini disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas kinerja serta produk DPR. "Hal ini diperburuk oleh tersangkutnya anggota dewan dalam kasus hukum, seperti korupsi, skandal moral, dan komunikasi publik yang kurang etis di media," katanya.

Terkorup

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama lima tahun berturut-turut DPR meraih predikat lembaga terkorup. "Parlemen di Indonesia

parlemen paling korup. Itulah unik Indonesia. Kelebihan parlemen kita, mereka kreatif," ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja pada kuliah "Upaya Pemberatasan Korupsi dan Anatomi Korupsi pada Pelaksanaan Pemilu", di Gedung KPU, Senin (16/9/2013).

Ia mengatakan, dibandingkan korupsi lembaga di negara-negara lain di Asia Tenggara, hanya di Indonesia yang anggota parlemennya melakukan korupsi, bahkan secara terstruktur.Mengapa korupsi? Ya karena biaya politik yang telah mereka keluarkan besar. Ketua Lajnah Siyasiyah/Politik DPP HTI Yahya Abdurrahman menjelaskan, biaya politik yang besar itu menuntut kompensasi dan membawa konsekuensi. Kompensasi itu maksudnya adalah kompensasi kepada pemilik modal yang memberikan modal.

Menurut Yahya, Itu bisa terjadi minimal melalui dua hal. Pertama dengan memberikan proyek. Proyek diusulkan dan diatur supaya didapatkan oleh pemilik modal itu. Jika proyek itu besar sesuai UU harus melalui lelang

tender, dan untuk memastikan biasanya lelang itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga tampak seolah transparan, tapi sebenarnya pemenang tender sudah diketahui sejak awal.

Cara kedua, lanjutnya, adalah dengan kebijakan dan peraturan yang menguntungkan pemilik modal baik lokal atau asing yang membantu membiayai mereka sebelumnya. Maka yang lahir adalah undang-undang dan aturan yang sangat pro kepada para pemilik modal, baik kapitalis lokal maupun kapitalis asing. Ini sudah terlihat dalam berbagai UU seperti UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, UU Minerga, UU Migas, dan UU Sumber Daya Air.

Inilah mengapa UU yang dikeluarkan tidak berpihak kepada rakyat. Ini, menurut Suswanta Abu Alya, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), sebagai dampak dari konspirasi antara para caleg dengan para cukong yang mem-back up mereka. Bahkan sekarang, para cukong (konglomerat) yang dulu hanya di belakang layar, sekarang langsung terjun menguasai partai politik untuk menentukan kebijakan negara.

Sedangkan konsekuensi, maksudnya adalah bagaimana modal yang dikeluarkan itu bisa kembali disertai keuntungan. Konsekuensinya ada dua, korupsi dan penghasilan untuk pejabat makin besar.

Namun demikian yang paling dominan adalah korupsi. Wajar bila wakil rakyat dikenal sebagai jago korupsi atau dalam beberapa kasus seperti Ketua MK, menjadi calo bagi koruptor lembaga lain. Di DPR sudah berderet nama kini menjadi terdakwa dan terpidana kasus korupsi yang nilainya milyaran.

Perilaku korupsi ini pun menjalar hingga ke DPRD. Di Papua Barat,

penjara satu tahun hingga satu tahun tiga bulan, berikut denda dengan besaran bervariasi. Sebanyak 44 wakil rakyat itu terbukti menerima dana Rp 22 milyar dari BUMD PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti mengontrak rumah, membeli kendaraan dan biaya mengunjungi konstituen.

Tak Wakili Rakyat

Sudah menjadi rahasia umum, DPR dan juga DPRD menjalankan politik transaksional. Ini konsekuensi logis mahalnya demokrasi. Menurut Suswanta, dalam politik praktis hari ini, "tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan." Dan kepentingan yang dimaksud bukanlah kepentingan rakyat, tapi kepentingan pihak-pihak yang mendanai para wakil rakyat tersebut atau yang bertransaksi dengan mereka.

Rakyat yang memilih akhirnya dihilangkan dari kamus wakil rakyat. Toh, fakta menunjukkan, setiap wakil rakyat ketika duduk di kursi tak bebas lagi menyuarakan atau mengambil keputusannya secara mandiri. Mereka harus tunduk pada kepentingan partai/fraksi. Yang berkuasa adalah ketua fraksi sebagai kepanjangan tangan ketua umum partai. Walhasil, para wakil rakyat itu sejatinya hanyalah wakil partai yang mengatasnamakan rakyat. []

Wacana 2

Rubrik 'Media Utama'
MU Edisi 124, 21 Maret-3 April 2014, Halaman 7

Demokrasi bagi Amerika adalah alat untuk mendominasi dunia. Makanya, negara manapun yang mengambil demokrasi sebagai sistemnya, pasti akan tetap ada dalam cengkraman Amerika. Tak akan bisa bangkit, karena Amerika tak menginginkan hal itu.

Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib menyatakan, secara fakta demokrasi

ia Umat dan pemanfaatannya sebagai bahan ajar
guruan Tinggi
tory.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

adalah sistem yang bobrok. Demokrasi menjadi jalan bagi para pemilik modal menguasai rakyat. Demokrasi tidak pernah menyuarakan suara rakyat, tapi hanya merupakan kepentingan segelintir orang saja.

Demokrasi meniscayakan kebenaran dan kebaikan ditentukan oleh manusia dan mengesampingkan agama [baca: Islam] karena didasari prinsip sekulerisme—pemisahan agama dari kehidupan. Dapat dipastikan, hukum-hukum yang dihasilkan akan berpihak kepada kepentingan para pembuat hukumnya saja.

Dari kacamata syariah, tindakan para pembuat hukum ini berarti menyejajarkan diri dengan Allah SWT. Bahkan, mereka lebih tinggi karena untuk melegalkan hukum Islam, harus mendapat persetujuan mereka. Bukankah ini tindakan syirik?

Walhasil, mempertahankan demokrasi berarti sama juga membiarkan negeri ini tetap dalam cengkraman asing dan membiarkan rakyat hidup tertindas serta berbuat maksiat kepada Allah SWT karena mereka mengesampingkan hukum Allah.

Banyak orang kemudian bingung, jika tidak menggunakan demokrasi, menggunakan sistem apa. Padahal ada banyak sistem yang berkembang di dunia. Dan di antara semua sistem tersebut, menurut Rokhmat, satu-satunya yang benar adalah sistem pemerintahan Islam. "Itulah khilafah. Karena itu berdasarkan wahyu Allah SWT," katanya.

Sistem itu sangat khas. Sistem ini sepenuhnya memberlakukan hukum

kepada manusia dan tidak meminak kepada satu kelompok tertentu. Hukumnya bersifat tetap sampai akhir zaman, tidak berubah dengan bergantinya rezim.

Sistem ini berbeda dengan sistem manapun, apakah sistem teokrasi, sistem kerajaan, sistem federasi, termasuk sistem demokrasi. Dan sistem ini bukan sistem baru, tapi sistem yang pernah diterapkan berabad-abad lamanya hingga menghasilkan peradaban dunia yang cemerlang. Hasilnya, bahkan dinikmati oleh manusia pada masa sekarang.

Will Durant, dalam bukunya 'The Story of Civilization', vol. XIII, halaman 151 menulis: "Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas, di mana fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan tersebar luas, hingga berbagai ilmu, sastera,

filsafat dan seni mengalami kemajuan luar biasa, yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad."

Secara akidah, menerapkan seluruh syariah Islam hukumnya wajib. Dan itu hanya bisa terjadi dalam sistem Islam yang disebut khilafah. "Maka kalau ada orang Islam yang menolak sistem Islam, patut dipertanyakan keislamannya," kata Rokhmat.

Lebih jauh ia menjelaskan, sistem Islam memberikan ruang bagi masyarakat seluas-luasnya untuk berpendapat, namun tetap dalam kerangka hukum syariah yang menjadi standar acuan. Di sana juga ada Majelis Umat yang berfungsi mengontrol khalifah, bukan legislasi hukum.

Khalifah dipilih oleh rakyat, bukan turun temurun seperti dalam sistem kerajaan. Ia dipilih untuk melaksanakan hukum syariah. Karena itu, lanjutnya, mengkritik penguasa yang menyimpang dalam Islam bukan hanya hak, tetapi sekaligus merupakan kewajiban. "Pahala sangat besar pun diberikan kepada mereka yang syahid mengkritik penguasa dengan sebutan sebaik-baik jihad (afdhal al-jihad) dan pemimpin para syuhada," jelasnya.

Terdapat juga Mahkamah Mazhalim yang akan menyelesaikan persengketan antara rakyat dan penguasa, kalau rakyat menganggap kebijakan penguasa merugikan mereka. Mahkamah Mazhalim juga akan meluruskan keputusan-keputusan khalifah yang bertentangan dengan hukum syariah.

Sistem Islam akan menjamin hak-hak mendasar manusia. Penerapan syariah Islam akan menjaga nyawa manusia, keturunan, harta dan kehormatan

pembunuhan, pencuri, pezina dll.

Dan tak kalah penting, sistem Islam akan menjamin kepastian hukum dan persamaan di depan hukum. Muslim dan non Muslim memiliki kedudukan yang sama.

Sementara itu dalam hal kesejahteraan, khilafah akan menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat, pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Barang tambang yang melimpah (emas, perak, minyak dll), air, hutan dan listrik merupakan milik umum yang digunakan untuk kepentingan rakyat; tidak boleh diberikan kepada swasta atau individu. Dengan cara seperti ini khilafah akan menyejahterakan rakyat.

"Campakkan demokrasi, tegakkan khilafah," tandas Rokhmat. Apa ada yang lebih baik dari sistem Islam?[]

PETUNJUK LATIHAN

Untuk menjawab latihan di atas silakan membaca kegiatan belajar dan contoh implementasi analisis wacana kritis model Roger Fowler dkk.

RANGKUMAN

Analisis wacana kritis model Roger Fowler, dkk., terutama mendasarkan pada penjelasan Halliday mengenai struktur dan fungsi bahasa. Fungsi dan struktur bahasa ini menjadi dasar struktur tata bahasa, dimana tata bahasa itu menyediakan alat untuk dikomunikasikan kepada khalayak. Apa yang dilakukan oleh Fowler, dkk., adalah meletakkan tata bahasa dan praktik pemakaiannya tersebut untuk mengetahui praktik ideologi. Beberapa elemen yang dipelajari oleh Fowler dkk., tersebut.

A. Kosakata

Roger Fowler dkk. memandang bahasa sebagai sistem klasifikasi. Bahasa mendeskripsikan bagaimana realitas dunia dilihat, memberi kemungkinan seseorang untuk mengontrol dan mengatur pengalaman

realitas sosial. Klasifikasi ini berbeda-beda antara orang atau kelompok satu dengan lainnya, sebab mengacu pada pengalaman budaya, sosial, dan politik yang berbeda pula. Pengalaman dan politik yang berbeda dapat dilihat dalam bahasa yang dipakai yang menggambarkan bagaimana pertarungan sosial terjadi.

Di sini, peristiwa yang sama dibahasakan dengan bahasa yang berbeda. Kata-kata yang berbeda itu semata-mata tidak saja masalah sintaksis tapi praktik ideologi tertentu. Pembaca juga akan menerima dengan pandangan yang berbeda pula terhadap penggunaan bahasa yang berbeda-beda. Kosakata menurut Eriyanto yaitu;

(a) mampu mengklasifikasi realitas tertentu dalam kategorisasi dan akhirnya dibedakan dengan realitas yang lain. Klasifikasi ini terjadi karena kompleksitas realitas, sehingga orang, menyusun dalam tingkat yang lebih sederhana dari realitas itu. Klasifikasi menyediakan untuk mengontrol informasi dan pengalaman.

(b) mampu memberi batasan pandangan. Seperti dikatakan Roger Fowler, bahasa pada dasarnya bersifat membatasi, kita diajak berpikir untuk

tidak mengalami atau mengikuti suatu peristiwa secara langsung maka ketika membaca kosakata tertentu akan dihubungkan dengan realitas tertentu.

(c) menjadi ranah dalam pertarungan wacana. Setiap pihak mempunyai versi tersendiri atas suatu masalah. Klaim atas kebenaran, dasar pembenar dan penjelas mengenai suatu masalah, berusaha agar versi kelompoknya dianggap paling benar dan lebih menentukan dalam mempengaruhi opini publik.

(d) menjadi alat marjinalisasi. Kata, tulis Roger Fowler dkk., adalah pilihan linguistik tertentu – kata, kalimat, proposisi – membawa nilai ideologis

tertentu. Kata dipandang bukan suatu yang netral, tapi ada implikasi ideologis tertentu. Pemakaian kata, kalimat, proposisi, bentuk kalimat, gaya, tidak semata-mata persoalan teknis tata bahasa atau linguistik, tapi ekspresi suatu ideologi: upaya pembentukan opini publik, meneguhkan, dan membenarkan pihak sendiri dan mengucilkan pihak lain. Teks memproduksi "posisi pembacaan" untuk khalayak, menyediakan perspektif bagaimana suatu teks harus dilibatkan juga hubungan transaksional dengan pembaca.

Titik perhatian dari Roger Fowler dkk. adalah pada representasi, bagaimana kelompok, seseorang, kegiatan, atau peristiwa tertentu ditampilkan dalam wacana publik. Proses representasi ini selalu melalui medium (bahasa). Bukan bias atau distorsi dari pemakaian bahasa yang menjadi fokus utama, tapi bagaimana pemakaian bahasa tertentu tidak objektif dan membawa nilai ideologis tertentu. Karena itu model Fowler dkk., dipusatkan pada salah representasi (*misrepresentation*) dan diskriminasi seseorang/kelompok dalam wacana publik.

Di sini, bagaimana pemakaian bahasa tertentu dapat secara sengaja atau tidak memarjinalkan dan mendiskriminasikan

B. Tata Bahasa

Penggunaan tata bahasa dalam mewacanakan suatu kasus atau peristiwa, juga berdampak pada pemaknaan yang akan diterima oleh halayak pembaca. Roger fowler dkk., memandang bahasa sebagai suatu set katagori dan proses yang menggambarkan antara objek dengan peristiwa. Dalam hal ini, dapat dilihat dari penggunaan bentuk kalimat. Seperti, penggunaan kalimat transitif (kalimat langsung), yakni melihat aktor atau bagianmana yang dianggap penyebab dan aktor atau bagian mana yang dianggap sebagai akibat.

Agus Suryana, 2014
Demokrasi dalam perspektif tabloid Media Umat dan pemanfaatannya sebagai bahan ajar mata kuliah analisis wacana kritis di Perguruan Tinggi
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Juga pada kalimat intransitif (kalimat tidak langsung), yakni aktor dihubungkan dengan proses tanpa menyebutkan atau menjelaskan akibat atau aktor lain yang dikenakan tindakan. Umumnya dua kalimat di atas biasanya digunakan pada bentuk kalimat aktif dan bentuk kalimat pasif. Penggunaan tata bahasa dalam menganalisis wacana pemberitaan dapat dilakukan dengan dua langkah:

a. Efek bentuk kalimat pasif : menghilangkan pelaku

Dalam kalimat aktif, yang ditekankan adalah subjek pelaku dari suatu tindakan, sedangkan kalimat pasif yang ditekankan adalah sasarannya atau korbannya. Efek dari kalimat pasif ini tidak hanya membuat halus atau netral posisi pelaku tatapi pelaku juga dapat dihilangkan dalam struktur kalimat. Titik tekan kalimatnya adalah sasaran atau korban. Seperti: "seorang mahasiswa tertembak peluru saat berdemonstrasi di depan gedung MPR". Posisi pelaku dihilangkan dengan memakai kosakata "tertembak".

b. Efek nominalisasi: menghilangkan pelaku

Efek dari nominalisasi adalah dengan melihat kalimat verbal menjadi

menghilangkan subjek atau pelaku karena dalam bentuk kalimat nominal titik tekannya bukan pada tindakan tetapi pada peristiwanya.

c. Kontek sejarah

Kontek sejarah (historis) dapat dilakukan dengan berbagai referensi buku-buku sejarah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dengan memilih yang sesuai dengan kontek sejarah yang terjadi.

Kategorisasi Wacana Demokrasi dalam Tabloid *Media Umat*

Pembahasan tentang wacana demokrasi yang menjadi topik inti dari tabloid *Media Umat* dapat dikategorisasikan dalam beberapa wacana, yaitu.

a. Demokrasi Tidak Mewakili Rakyat

Pembahasan tentang demokrasi sudah menjadi pembahasan yang paling banyak diminati, betapa tidak hampir semua kajian sosial politik pasti menjadikan wacana demokrasi sebagai topik utama, dalam tabloid *Media Umat* diungkap terkait wacana demokrasi yang sudah tidak sejalan dengan slogan yang selama ini dikenal, yakni "Demokrasi Mewakili Rakyat".

Sudah menjadi rahasia umum, DPR dan juga DPRD menjalankan politik transaksional. Ini konsekuensi logis mahalnya demokrasi. Menurut Suswanta, dalam politik praktis hari ini, "tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan." Dan kepentingan yang dimaksud bukanlah kepentingan rakyat, tapi kepentingan pihak-pihak yang mendanai para wakil rakyat tersebut atau yang bertransaksi dengan mereka.

Rakyat yang memilih akhirnya dihilangkan dari kamus wakil rakyat. Fakta menunjukkan, setiap wakil rakyat ketika duduk di kursi tak bebas lagi menyuarakan atau mengambil keputusannya secara mandiri. Mereka harus tunduk pada kepentingan partai atau fraksi. Yang berkuasa adalah ketua fraksi sebagai kepanjangan tangan ketua umum partai. Walhasil, para wakil rakyat

Bagi mereka yang terpilih jadi wakil rakyat, mereka pun harus menghitung untung dan rugi. Karena, berdasarkan riset Pramono Anung, motivasi mereka menjadi anggota legislatif sebenarnya adalah kekuasaan dan faktor ekonomi.

Tentu, kekuasaan itu akan menjadi ajang bagi mereka untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan sebelum pemilu berlangsung. Baik itu berupa uang dan janji yang harus ditepati kepada para pendukungnya, apakah itu uang atau kebijakan, izin, proyek, dll.

Mengandalkan gaji dan pendapatan saja untuk menutupi seluruh pengeluaran kampanye tentu tidak cukup. Maka jalan lainnya adalah mempermainkan anggaran dan kebijakan. Bagaimana pun saat ini posisi legislatif sangat dominan dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Ujung-ujungnya adalah korupsi.

Jangankan untuk memikirkan rakyat, pasti yang paling utama mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa bebas utang dan mendapatkan keuntungan dari posisinya saat ini. Dan berikutnya, bagaimana mereka mempertahankan kursinya untuk periode berikutnya sehingga mereka pun harus mencari modal untuk itu.

Politik transaksional ini menghasilkan kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat. Ini bisa dimaklumi karena tidak bisa dipungkiri bahwa caleg itu tersandera oleh uang para kapitalis (pemilik modal). Bahkan sebagian besar wakil rakyat adalah para kapitalis itu sendiri. Maka, bagaimana mereka akan konsentrasi memikirkan rakyat? Inilah wacana yang ingin ditampilkan tabloid *Media Umat* yakni wacana bahwa demokrasi sudah tidak mewakili rakyat lagi.

b. Demokrasi Menjadikan Para Pemodal Sebagai Pemenang

Tabloid *Media Umat* mencoba menguatkan opini dan meyakinkan

pemodal sebagai pemenang. Ini bisa dilihat dari kenyataan bahwa kian hari, biaya kampanye kian mahal. Riset Pramono Anung menunjukkan, biaya kampanye 2009 naik 3,5 kali lipat dibandingkan pemilu 2004. Tahun ini ia memperkirakan biaya akan naik lagi 1,5 kali lipat sebelumnya.

Tahun 2009, terpilih anggota legislatif (DPR) dengan komposisi 72 persen wajah baru dan 28 persen wajah lama. Kebanyakan latar belakangnya bukan politisi.

DPR didominasi oleh para pengusaha dan publik figur. Dari hal itu, kata Pram—demikian ia biasa dipanggil—dapat disimpulkan, jadi anggota legislatif, ada dua yang harus menjadi prasyarat utama, modal kapital yang semakin lama semakin besar dan populer.

Bahkan, kata Pram, ada seseorang yang mengeluarkan Rp 22 milyar untuk biaya politik menjadi caleg. Ini wajar saja karena sekarang muncul banyak konsultan politik yang biayanya mahal. Ada yang berbayar hingga Rp 18 milyar atau konsultan *door to door* (dari pintu ke pintu) dengan bayaran Rp 2 milyar.

"Ada hal yang mengkhawatirkan bagi saya sebagai politisi, maka, pertama, sistem politik kita melahirkan sistem biaya tinggi. Yang terjadi siklus *money-power, more money-more power*. Tanpa menjadi kader, semua orang bisa menduduki kursi di parpol tertentu," jelasnya.

Jelas, semuanya ditentukan oleh uang. Inilah demokrasi *do it* alias duit.

c. Demokrasi Menjadi Alat Para Kapitalis (Dalam dan Luar Negeri) untuk Mewujudkan Kepentingan Mereka Atas Nama Konstitusi

Dalam kasus Indonesia, Amerika bekerja sama dengan sangat erat dengan militer Indonesia sejak rezim Soeharto berkuasa. Dalam bukunya, William Blum menggambarkan, kerja sama ini merupakan kerja sama paling erat di negara dunia ketiga.

membantu menjaga kepentingan Amerika di Indonesia atas nama demokrasi. Tak heran banyak petinggi militer yang berkiblat kepada Amerika. Termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengaku bahwa Amerika adalah negara keduanya.

Di bidang ekonomi, Amerika merampok kekayaan alam Indonesia atas nama penanaman modal asing. Di era 60-an ketika Orde Baru lahir, Amerika

mengarahkan Soeharto agar memberi jalan bagi perusahaan Amerika beroperasi di Indonesia. Ini sebagai kompensasi naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan setelah berhasil menyingkirkan Presiden Soekarno.

Jejak intervensi Amerika ini bisa terbaca pada setiap rezim. Pergantian rezim yang satu dengan rezim yang lain tak lepas dari kendali Amerika. Tak heran jika tidak ada perubahan kebijakan yang berarti dalam setiap kurun menyangkut sepak terjang perusahaan asing di Indonesia, termasuk perusahaan Amerika. Yang terjadi malah rezim-rezim penguasa tersebut mengokohkan keberadaan perusahaan asing itu untuk terus beroperasi di Indonesia.

Pengokohan itu dapat ditelusuri dari berbagai produk perundangan yang berlaku. Semakin ke sini, berbagai undang-undang kian liberal. Ini berarti membuka kran bagi masuknya investasi asing ke Indonesia.

Walhasil, demokrasi yang katanya untuk kepentingan rakyat tak pernah terbukti secara fakta. Demokrasi menjadi alat para kapitalis—dalam dan luar negeri—untuk mewujudkan kepentingan mereka atas nama konstitusi. Produk-produk hukum liberal lahir dari tangan wakil rakyat. Jadi semuanya seolah legal.

Dalam situasi seperti itu, terjadilah tirani minoritas atas mayoritas. Tirani minoritas ini adalah para kapitalis yang tergabung dalam partai politik. Biaya politik yang mahal bisa menjadi jalan bagi Amerika memaksakan

hanya diambil suaranya lima tahunan untuk melegitimasi tirani mereka. UU pun pro asing. Amerika tetap dominan.

d. Demokrasi: Ekspor Amerika Paling Mematikan

"Demokrasi: Ekspor Amerika Paling Mematikan", adalah topik yang dibahas di tabloid *Media Umat* yang merupakan sebuah buku yang ditulis oleh

William Blum. Buku tersebut bisa dikatakan buku yang menelanjangi demokrasi di saat orang Indonesia lagi mabuk demokrasi.

Buku ini diterjemahkan dari buku aslinya berjudul: *America's Deadliest Export Democracy*. Buku tersebut ditulis oleh William Blum, seorang pakar anti-*mainstream* yang meninggalkan tugasnya di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada 1967 karena berseberangan dengan kebijakan AS di Vietnam.

Ia mengingatkan, Amerika bukanlah seperti yang banyak orang sangka. Untuk memahami kebijakan luar negeri AS, kata Blum, orang harus memahami prinsip bahwa AS berupaya mendominasi dunia, dan untuk tujuan ini, Amerika akan menempuh jalan apa saja yang diperlukan.

Ia kemudian mengungkap angka, bagaimana dominasi Amerika itu berlangsung. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika telah berupaya keras untuk menggulingkan lebih dari 50 pemerintahan di luar negeri yang dipilih secara demokratis. Secara kotor, AS telah ikut campur tangan dalam pemilu di lebih dari 30 negara, mencoba membunuh lebih dari 50 orang pemimpin negara-negara asing, mengebom penduduk di lebih dari 30 negara, mencoba untuk menekan gerakan rakyat atau nasionalis di 20 negara.

"Tujuh puluh negara (lebih dari sepertiga jumlah negara di dunia), di dalam proses tersebut, AS telah mencabut nyawa beberapa juta orang, membuat jutaan orang lainnya hidup dalam kepedihan dan penderitaan, dan bertanggung jawab terhadap penyiksaan yang dilakukan atas ribuan orang

Menurut Blum, slogan dan angkapan Amerika dapat diasosiasikan dengan rezim Nazi Jerman. Kalau Nazi menggunakan slogan "Jerman di atas segalanya" maka Amerika pun menggunakan hal yang sama "Di atas segalanya". Amerika ingin mendominasi dunia.

Ambisi Washington itu, lanjutnya, bukan didorong oleh tujuan untuk membangun demokrasi yang mendalam ataupun kebebasan, dunia yang lebih

adil, menghentikan kemiskinan atau kekerasan, atau planet yang lebih layak dihuni, melainkan lebih karena ekonomi dan ideologi.

"Bagi kekuatan elite Amerika, salah satu tujuan abadi dan paling inti dari kebijakan luar negeri adalah mencegah bangkitnya masyarakat apa pun yang mungkin dapat menjadi contoh yang baik bagi suatu alternatif di luar model kapitalis," tulis Blum.

Untuk kepentingan itu, kata Blum, tidak ada hal yang lebih mereka sukai selain menciptakan ulang dunia sesuai dengan imaji Amerika, dengan perusahaan bebas, 'individualisme', apa yang disebut dengan 'nilai-nilai yahudi-Kristen', dan hal-hal lain yang mereka sebut sebagai 'demokrasi' sebagai unsur utamanya.

Blum menjelaskan, Amerika tidak peduli dengan apa yang disebut dengan 'demokrasi', sesering apapun Presiden Amerika Serikat menggunakan kata tersebut setiap kali membuka mulutnya. "Yang mereka pikirkan adalah memastikan negara sasaran tersebut memiliki mekanisme-mekanisme politik, keuangan, serta hukum yang sesuai dan ramah terhadap globalisasi korporasi," tandasnya.

Salah satu instrumen yang digunakan Amerika untuk mendominasi negara lain adalah Marshall Plan. Ini, kata Blum, adalah salah satu 'wajah mulia' dari urusan-urusan Amerika di era modern.

Padahal, menurutnya, Marshall Plan adalah salah satu anak panah di

keinginan Amerika. Keinginan itu antara lain menyebarkan kidung pujian kapitalis, membuka pasar bebas bagi produk AS, dan menghancurkan kaum kiri di seluruh Eropa yang ingin bangkit.

Melalui Marshall Plan ini, AS menetapkan berbagai bentuk pembatasan kepada negara penerima. Semua ditentukan oleh Amerika. Dan bagian terbesar dari dana Marshall Plan kembali ke Amerika. Ia kemudian mengutip

pernyataan USAID tahun 1999, "Penerima manfaat utama dari program-program bantuan luar negeri adalah Amerika Serikat."

Kategorisasi wacana tentang demokrasi dalam tabloid *Media Umat* tersebut menjadi wacana utama yang akan melandasi pembahasan-pembahasan berikutnya.

TES FORMATIF

a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar !

1) Dalam membangun model analisisnya, Roger Fowler dkk., terutama mendasarkan pada penjelasan..

a. Teun A. Van Dijk

b. Halliday

c. Theo Van Leeuwen

d. Sara Mills

2) Roger Fowler dkk., memandang bahasa sebagai sistem..

a. Bunyi

b. Artikulasi

c. Klasifikasi

d. Verbal

3) Berikut ini adalah fungsi kosakata dalam analisis Roger Fowler dkk., kecuali…

a. membatasi pandangan

b. pertarungan wacana

c. konfrontasi ide

d. Marjinalisasi

4) Pendekatan yang dilakukan Roger Fowler dkk., dikenal sebagai…

a. *critical language*

b. *critical linguistics*

c. *critical history*

d. *critical literature*

5) Roger Fowler dkk., memandang bahasa sebagai satu set…

a. pemikiran dan ide

b. pemikiran dan perilaku

c. kategori dan proses

d. kategori dan alur

Agus Suryana, 2014
Demokrasi dalam perspektif tabloid Media Umat dan pemanfaatannya sebagai bahan ajar mata kuliah analisis wacana kritis di Perguruan Tinggi
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

6) Berikut adalah tiga model yang diperkenalkan Roger Fowler dkk., kecuali :

a. transitif

b. atributif

c. intransitif

d. relasional

b. Kunci jawaban

Kunci jawaban tersedia di bagian akhir modul ini.

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Cocokkan jawaban di atas dengan kunci jawaban tes formatif yang ada di bagian akhir modul ini. Ukurlah tingkat penguasaan materi kegiatan belajar dengan rumus sebagai berikut :

Tingkat penguasaan = (Jumlah jawaban benar : 6) x 100 %

Arti tingkat penguasaan yang diperoleh adalah :

Baik sekali = 90 – 100 %

Baik = 80 – 89 %

Cukup = 70 – 79 %

Kurang = 0 – 69 %

Bila tingkat penguasan mencapai 80 % ke atas, berarti hasil Baik, dan mahasiswa dapat melanjutkan pada kegiatan belajar berikutnya. Namun bila tingkat penguasaan masih di bawah 80 % harus mengulangi Kegiatan Belajar 1 terutama pada bagian yang belum dipahami.

KUNCI JAWABAN

Tes Formatif

Agus Suryana, 2014
Demokrasi dalam perspektif tabloid Media Umat dan pemanfaatannya sebagai bahan ajar mata kuliah analisis wacana kritis di Perguruan Tinggi
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1) b

2) c

3) c

4) b

5) c

6) b

DAFTAR PUSTAKA

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cutting, J. 2002. *Pragmatics and Discourse*.

London and New York: Routletge.

Davis, H. dan Walton, P. (ed.) 1984. *Language, Image, Media.*
England: Basil Blackwell Publisher Limited.

Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*.
Yogyakarta: LkiS.

Kurnia, Rahmat. 2002. *Negara Khilafah vs Negara Demokrasi.*
Al-Wa'ie No.19. Maret 2002.

Moleong, Lexy J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
Jakarta: Depdikbud.

Sajid, Ahmad. 2002. *Demokrasi Peradaban Sampah.*
Al-Wa'ie No. 22. Juni 2002.

Sobur, A. 2000. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*.
Bandung: Remadja Rosdakarya.

Sugono, dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Edisi Keempat)*.
Jakarta: Gramedia.

Suhelmi, Ahmad. 1999. *Pemikiran Politik Barat*.
Jakarta: Pustaka Jaya.

Syamsudin AR. 1992. *Studi Wacana, Teori Analisis-Pengajaran.*
Bandung: Mimbar Pendidikan Bahasa dan Seni FPBS IKIP Bandung.

Uwik, Gus. 2002. *Demokrasi dan "Kebohongan Publik".*
Al-Wa'ie No. 23. Juli 2002.

Tabloid *Media Umat*, edisi 119 (3-16 Januari 2014).

Agus Suryana, 2014
Demokrasi dalam perspektif tabloid Media Umat dan pemanfaatannya sebagai bahan ajar mata kuliah analisis wacana kritis di Perguruan Tinggi
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu